

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh perorangan maupun suatu badan yang telah memiliki tolak ukur selaku usaha mikro. UMKM sebagai sektor ekonomi kecil yang dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan, yang mana bagian integral dari ekonomi kerakyatan (Purba, 2019). UMKM yang sering ditemui di Indonesia antara lain yaitu UMKM di bidang Kuliner, Fashion, Kecantikan, Agribisnis, hingga dalam bidang Otomotif. Adapun ciri-ciri pada UMKM adalah bentuk dagang atau produk yang tersedia biasanya tidak tetap atau dapat berubah seiring perkembangan yang muncul. Lalu dalam melaksanakan usahanya, tempat dapat berganti kapan saja. Selain itu, usahanya masih belum mengimplementasikan administrasi dengan baik, apalagi urusan keuangan personal masih digabungkan dengan keuangan usaha hingga UMKM umumnya belum memiliki surat izin usaha (legalitas) termasuk dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

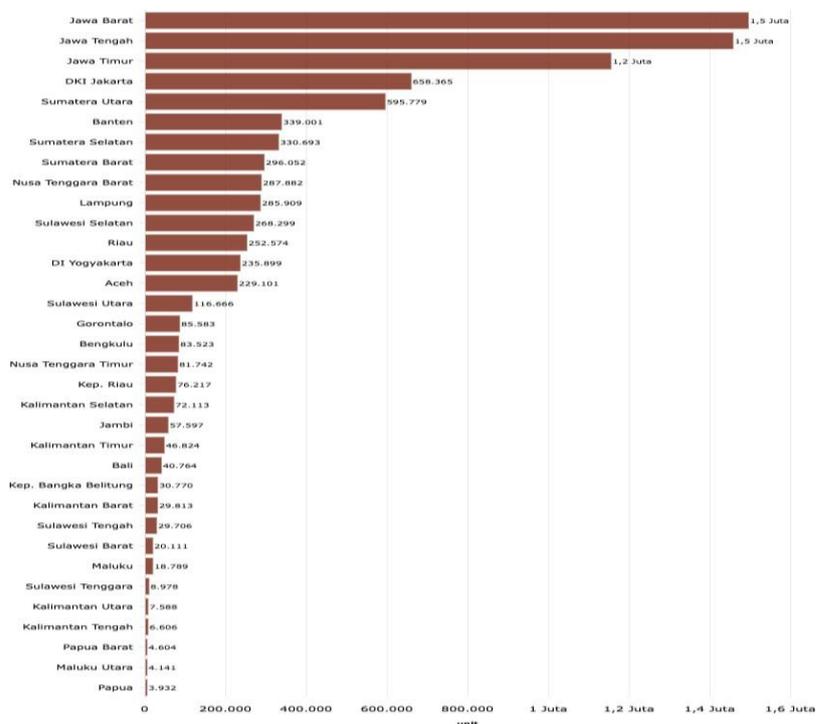
Bidang usaha UMKM di Indonesia telah berjalan cukup pesat. Adapun peran UMKM di Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi, yakni selalu berkembang setiap tahunnya terlihat dari jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin bertambah. Mulai tahun 2010 sampai 2017, jumlah PDB UMKM meningkat dua kali lipat. Pada tahun 2018, UMKM memberikan sebanyak 58,18% dari total investasi. Total unit UMKM tahun 2022

menembus di angka 8,71 juta unit usaha. UMKM menyangga pertumbuhan ekonomi, dinilai cukup pesat yang dilihat melalui jumlah UMKM, yang mana UMKM merupakan penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan PDB atas dasar harga konstan serta yang terjadi, keterlibatan UMKM mendapati peningkatan tiap tahunnya. Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) bulan Maret 2021, keterlibatan UMKM mengenai PDB sebesar 61,07% yakni senilai Rp 8.573,89 triliun. Dengan kondisi tersebut, membuat UMKM menjadi jaring pertahanan di sisi lain penyangga perekonomian kepada masyarakat.

Di Indonesia, UMKM memerankan dasar fundamental dalam perekonomian Indonesia. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Jakarta pada 1 Oktober 2022 pukul 19:57 menyatakan bahwa UMKM menyerap sebanyak 97% dari tenaga kerja yang bekerja dan menghimpun sampai dengan 60,4% dari total investasi. Hal ini menjadikan UMKM berperan sebagai pembantu masyarakat lokal agar produktif dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Gambar 1.1

Jumlah UMKM Versi Kemenkop UKM 2022



Sumber Data: Databoks, 2022

Dapat dilihat bahwa UMKM berkembang di wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), terdapat sebanyak 8,71 juta unit UMKM yang terdapat di Indonesia. Pada gambar 1.1, UMKM yang terletak di Pulau Jawa tercatat pada wilayah Jawa Barat memiliki jumlah terbanyak sebanyak 1,49 juta unit usaha. Di urutan kedua terdapat di Jawa Tengah sebanyak 1,45 juta unit. Lalu di urutan ketiga terdapat di Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Sedangkan jumlah unit usaha yang memiliki sedikit UMKM terdapat di Papua sebanyak 3,9 ribu unit, Maluku Utara sebanyak 4,1 ribu unit, dan Papua Barat sebanyak 4,6 unit usaha. UMKM

ialah salah satu sektor yang selalu menurunkan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Pada pengembangan UMKM di Indonesia, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu masalah yang dialami UMKM yaitu kesusahan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan usahanya, seperti modal, informasi, dan teknologi. Keadaan lainnya, UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan tren pasar yang cepat dan persaingan yang semakin ketat dengan usaha yang lebih besar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satu contohnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PNPM-UMKM).

PNPM-UMKM adalah inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan UMKM dengan fokus pada peningkatan mutu dan daya saing. Program ini termasuk sejumlah aktivitas, contohnya pada pelatihan, penyediaan modal, serta penyediaan akses terhadap informasi dan teknologi. Hal lainnya, pemerintah sudah menyediakan kebijakan pendukung lainnya, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Fasilitas dan Jaminan Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan peringatan akan resesi semakin dekat, dimana perihal

perniagaan dunia pada 2023 pun di perkirakan hendak semakin keras. Peringatan akan resesi membayangi seluruh negara di dunia. Berbagai di antaranya justru telah masuk ke dalam jurang resesi dan mendapati kenaikan inflasi. Ketika terdapat beberapa perusahaan yang mendapati kemerosotan, UMKM dapat terus berjalan di tengah tekanan ekonomi. UMKM dapat dikatakan sebagai penyokong persentase yang besar sebagai usaha menurunkan angka pengangguran. Selain itu, UMKM tidak terlalu bergantung terhadap mata uang asing. Untuk itu, naik-turunnya nilai dolar tak akan berpengaruh besar terhadap UMKM. Dengan demikian posisi UMKM masih tangguh meskipun berada dalam rawan krisis ekonomi dunia. Antisipasi UMKM 2023 adalah solusi jitu atas ancaman resesi tidak dapat dilihat sebelah mata. UMKM dapat memproduksi berbagai macam produk yang mana mulai dari penjual keliling hingga *home industry*.

Pembinaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan terlebih dalam hal pemberian kesempatan kepada masyarakat wirausaha dan penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan cara pendampingan serta pemantauan (*monitoring*). Di Kota Semarang, terdapat sebanyak 17.603 UMKM yang tersebar di seluruh kota. Pemerintah kota Semarang terus berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi UMKM, salah satunya melalui program Kampung Tematik. Berikut persebaran UMKM yang berada di Kota Semarang:

Tabel 1.1
Daftar UMKM di Kecamatan Kota Semarang Tahun 2023

KECAMATAN	TOTAL PELAKU UMKM
Genuk	919
Semarang Timur	1062
Semarang Tengah	1312
Semarang Barat	1424
Tugu	432
Gayamsari	1109
Semarang Utara	1683
Ngaliyan	656
Pedurungan	2818
Mijen	572
Gunung Pati	586
Gajah Mungkur	618
Semarang Selatan	1013
Candisari	696
Banyumanik	998
Tembalang	1702

Sumber Data: Website resmi Pemerintah Kota Semarang

Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan adanya berbagai program telah diupayakan untuk mengembangkan potensi UMKM di Kota Semarang. Upaya dalam pengembangan kemampuan masyarakat dan membangun masyarakat mandiri dengan melahirkan lebih banyak wirausahawan baru asumsinya sederhana terlebih kemandirian ekonomis. Beberapa program tersebut di antaranya yaitu PNPM-UMKM, Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juara, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program GadePreneur. Dalam rangka mendorong UMKM agar terus berkembang di Kota Semarang, pemerintah menurunkan program Kampung Tematik.

Kampung Tematik adalah salah satu program dari Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan fokus pada beberapa

aspek, seperti memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat dari kondisi yang tidak layak menjadi lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan keterampilan dan potensi ekonomi masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan wilayah. Program Kampung Tematik diatur secara resmi dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Panduan Pelaksanaan Kampung Tematik. Implementasi program ini melibatkan pembentukan kampung tematik baru serta perkembangan yang dilakukan terhadap kampung-kampung tematik yang sudah ada sejak periode 2016-2018, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan efektivitas program. Kampung Tematik merupakan suatu wilayah yang berada dalam naungan kelurahan dengan memperlihatkan jati diri ataupun identitas dari potensi lokal yang diperlihatkan atas kesepakatan bersama masyarakat di suatu wilayah tersebut. Dalam kampung tematik terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keperluan dasar dengan memanfaatkan potensi lokal kampung tematik melalui potensi kampung, kearifan wilayah, serta prasarana UMKM produk pendukung kampung tematik.

Hal dasar pelaksanaan suatu wilayah menjadi Kampung Tematik dapat diamati dari 3 parameter kelayakan tema yaitu sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Tiga parameter itu merupakan dasar penjadian tema yang diusung pada kampung tematik. Tema yang diusung tersebut bermacam-macam seperti seni budaya, pariwisata, UMKM, potensi sumber daya, dan lainnya. Kebanyakan kampung tematik dibuat karena adanya pertimbangan produk unggulan yang mampu dijalankan sebagai keluaran unggulan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

untuk menaikkan taraf ekonomi. Hal lainnya, terdapat kampung tematik yang dibuat dengan alasan terdapat kekhasan yang lain, seperti karakter sosial masyarakat di suatu wilayah dan penyediaan jasa.

Salah satu Kampung Tematik yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu Kampung Tematik *Home Industry* yang berada di RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Diawali dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mengurus UMKM yaitu Kelompok Kerja III (Pokja III) dengan mengarahkan, mencatat, dan mendata mengenai usaha rumah tangga atau *home industry*. Salah satu tugas dari Pokja III yaitu mengembangkan kreativitas UMKM dengan berbagai produk busana, cinderamata khas daerah dalam rangka penunjang pariwisata, dan pendorong terbentuknya lapangan pekerjaan dalam bidang jasa, sandang, pangan, serta perumahan dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Kampung Tematik *Home Industry* ini diadakan setelah keberlangsungan Rumah Sehat tingkat kota antar kecamatan bulan April 2016, yang mana dituntut untuk memberikan inovasi atau unggulan. Dari RW 01 sampai 06 yang mempunyai banyak produsen industri yaitu pada RW 05. Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Kampung Tematik *Home Industry* sampai terealisasi perencanaannya yang merupakan periode pertama bersama dengan kampung lainnya. Kampung tematik *home industry* ini didirikan melalui dasar banyaknya masyarakat yang tinggal berada di wilayah tersebut sebagai pelaksana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbagai kemampuan diperlihatkan dengan kekhasan yang dimiliki setiap pelaku UMKM, yang mana perlu dikembangkan agar menjadi suatu potensi optimal dalam

pengembangan program Kampung Tematik. Kampung Tematik *Home Industry* dikenal dengan berbagai produksi usaha, yaitu :

Tabel 1.2

Data UMKM Makanan Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	NAMA USAHA (MAKANAN)	PEMILIK
1.	Aneka Kue Kering	Ibu Arista
2.	Aneka <i>Snack</i>	Ibu Saparini
3.	Aneka <i>Snack</i>	Ibu Jumiati
4.	Aneka <i>Snack</i>	Ibu Rini
5.	Ayam Geprek	Ibu Lilis
6.	Bandeng Populer	Ibu Arista
7.	Bandeng Thole	Bp. Tole
8.	Bawang Goreng	Ibu Untung
9.	Donat	Sumarni
10.	Hazel Chiffon	Bp. Arif Nurrahman
11.	Katering	Ibu Wiwik
12.	Katering	Ibu Sarni
13.	Krupuk Berkah	Ibu Ngarni
14.	Lumpia Jamur	Bp. Yusuf
15.	Lumpia Rebung	Bp. Amar
16.	Mie Ayam	Bp. Sumidi
17.	Nasi Bungkus	Ibu Susiyati
18.	Nasi Bungkus	Bp. Sobari
19.	Nasi Goreng Bu Nuk	Ibu Sukarnowati
20.	Nasi Goreng Kalimas	Bp. Arif Nurrahman
21.	Opak Solo	Ibu Saodah
22.	Peyek Berkah	Ibu Nurgiasih
23.	Proll Tape	Ibu Budi Lestari
24.	Sambal Abon Jambal	Ibu Nining
25.	Sate Bakso	Ibu Ariwahyuni
26.	Sate Donat	Ibu Safa
27.	Soto	Bp. Yusuf
28.	Susu Segar	Bp. Sartono
29.	Tahu Bakso 2W	Ibu Tri Wulandari
30.	Tahu Bakso Lilik	Bp. Wahyu Yulianto
31.	Telur Asin	Bp. Yusuf

Sumber Data: Data Sekunder (diolah), 2023

Tabel 1.3
Data UMKM Barang Kampung Tematik *Home Industry* di
Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	NAMA USAHA (BARANG)	PEMILIK
1.	Asbag Rajut	Ibu Tri Astuti
2.	BL Kraft Rajut	Ibu Budi Lestrari
3.	Bonsai Bunga Plastik	Bp. Untung
4.	Kerajinan Limbah	Bp. Dul Rochim
5.	Oemah Dekor	Bp. Nendro
6.	Perabot RT	Ibu Sri Wahyuni
7.	Pot Tanaman	Bp. Margono
8.	Sulam Pita	Ibu Edi
9.	Tas Anyam	Bp. Yusuf
10.	Ternak Cacing	Ibu Rahayu
11.	Warung Pojok Biru	Ibu Harni

Sumber Data: Data Sekunder (diolah), 2023

Pada tahun 2023, terdapat jumlah UMKM yang berada di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari sebanyak 42 UMKM dengan berbagai jenis olahan yang di jual mulai dari makanan hingga barang jadi. Hal ini menarik perhatian masyarakat Kota Semarang untuk mengunjungi kampung tematik *home industry* tersebut karena menjual berbagai kreasi produk sehingga pengembangan program ini terus berjalan. Tetapi di balik perkembangan usaha masyarakat selaku UMKM melalui kampung tematik *home industry* tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai implementasi pada Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari.

Terdapat beberapa kelemahan pada aspek sumber daya dari pelaku UMKM yang memegang peranan terpenting. Hal ini disebabkan karena pemilik usaha atau yang menciptakan produk mengalami insiden seperti kecelakaan, sakit, hingga

meninggal dunia, sehingga sumber daya yang tersedia menjadi berkurang. Peristiwa ini membuat omset penjualan menjadi menurun atau tenggelam. Terdapat pula beberapa pelaku UMKM yang masih merintis masih belum mempunyai izin usaha yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan alasan tidak hafal nomor telepon, email, hingga tidak ada rekening serta tidak memiliki NPWP.

Pada sisi pemerintah atau struktur birokrasi yang menangani permasalahan Kampung Tematik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Dinas ini merupakan pihak yang memfasilitasi serta mengawasi masyarakat khususnya UMKM di kampung tematik. Bappeda melakukan pembinaan kepada UMKM dengan memberi dana serta pemantauan. Akan tetapi, lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Bappeda membuat pelaku UMKM pada pengembangan produk tidak dapat optimal. Pelaku UMKM merasa kurang adanya fasilitator pemerintah tersebut dalam membantu mengembangkan usaha dari para pelaku UMKM agar kualitas produk-produk yang telah dibuat dapat laku di pasar Kota Semarang maupun wilayah di Jawa Tengah hingga skala nasional. Hal tersebut membuat pemasukan yang diterima pelaku industri mengalami stagnan atau tidak adanya peningkatan.

Hal lain pun terlihat dari banyaknya UMKM yang kurang merasa terbantu karena Bappeda masih kurang memberikan fasilitas pelatihan yang dapat disinkronisasikan dengan perangkat lain yang terdapat di Kecamatan Candisari. Hal ini diakibatkan karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi tenaga kerja kepada para pelaku UMKM. Untuk itu perlu adanya pemasaran yang lebih luas dari

sebelumnya serta pemberian ruang pemerintah kepada seluruh pelaku usaha yang berada di Kampung Tematik seluas-luasnya pada keperluan yang dibutuhkan agar nantinya dapat disinergikan bersama dengan seluruh pihak yang berkaitan pada implementasi kampung tematik *home industry*.

Bappeda pun harus patut menyinergikan anggaran agar dimanfaatkan masyarakat sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Diketahui bahwa terdapat sokongan dana sebesar Rp 200.000.000,- yang hanya diluncurkan sekali digunakan pada pembuatan gapura dan perbaikan paving jalan sedangkan pada *maintenance* fasilitas tersebut menggunakan swadaya UMKM, serta kampung tematik *home industry* tidak mempunyai kas kelompok.

Salah satu keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan komunikasi. Aspek komunikasi yang terjadi antara ketua RW 05 dengan UMKM terjalin dengan kurang baik. Hal ini mengakibatkan saran ataupun masukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada dukungan potensi dan mengatasi permasalahan yang muncul di kampung tematik *home industry* kurang berjalan secara efektif dan efisien. Komunikasi yang dilakukan seharusnya dapat mencakup seluruh langkah sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi *miss communications* dari pihak ketua RW maupun UMKM.

Pengimplementasian aspek disposisi yang efektif dan efisien terjadi ketika pihak pembuat keputusan mengerti apa yang dibuat. Pedoman akan berjalan dengan lancar apabila komunikasi yang terjadi dilakukan secara optimal dimana ketetapan dan regulasi dari pelaksanaan kerap dikomunikasikan dengan bagian personalia

yang tepat (Handityasa & Purnaweni, 2020). Menurut hubungan yang dilakukan oleh warga RW 05, pelaku UMKM belum sepenuhnya mengetahui mengenai pedoman dalam penerapan dan perkembangan kampung tematik *home industry*. Ketua RW pun masih minim dalam melakukan adanya pertemuan dan mendiskusikan bersama melalui saran-saran dari UMKM. Pelaku UMKM lebih membutuhkan adanya pendampingan hingga pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sehingga dalam pelaksanaan pembuatan hasil produksi mereka dapat membuahkan hasil yang optimal terhadap penjualan ke pihak luar kampung tematik.

Dalam memahami secara baik faktor pendukung dan penghambat di kampung tematik *home industry*, diperlukannya analisis yang mendalam menggunakan metode fishbone. Faktor pendukung dan penghambat ini memiliki akar penyebab dan saling berkaitan, seperti halnya tulang ikan yang memiliki cabang-cabang yang terhubung. Konteks kampung tematik *home industry*, faktor pendukung dan penghambat tidak hanya terbatas pada aspek kebijakan pemerintah dan infrastruktur, tetapi mencakup pula faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan metode fishbone, penulis dapat mengetahui tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat dikualifikasikan sebagai faktor pendukung dan mana faktor penghambat yang mana saling mempengaruhi serta strategi dapat dirancang untuk memaksimalkan faktor pendukung dan mengatasi hambatan yang muncul. Dengan demikian, metode fishbone memberikan kerangka kerja untuk menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kampung tematik *home industry*.

Pada hal pengimplementasian, tidak hanya proses untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan UMKM yang diperhatikan. Kerja sama serta partisipasi UMKM pun adalah komponen penting dalam implementasi kebijakan ataupun program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah pun menjadi aspek penting oleh pelaku UMKM karena merupakan penguatan dari kemampuan mempertahankan daya saing pasar. Penelitian ini menggunakan regulasi Peraturan Walikota yang berlaku mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik yang akan dijadikan landasan peneliti dalam menganalisis implementasi program *home industry* dan menggunakan teori Edward III serta fishbone sebagai metode mengidentifikasi atau mengelompokkan faktor pendukung dan penghambat di kampung tematik *home industry*. Dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menganalisis penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelaku UMKM Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang belum mengetahui secara detail pedoman pelaksanaan Kampung Tematik
2. Komunikasi yang terjadi antara Ketua RW 05 dengan UMKM Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang kurang terjalin dengan baik
3. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Bappeda kepada UMKM

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang berhubungan dengan Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat dengan memperlihatkan bahwa terdapat hasil setelah selesainya penelitian. Pada hal ini, tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi

program Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah dampak dari pencapaian suatu tujuan. Lewat uraian serta pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, diharapkan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih lanjut di masa depan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk pembelajaran dan pengalaman yang baru bagi peneliti. Untuk itu, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi metode penelitian lainnya dan sebagai pembanding pada penelitian-penelitian mendatang.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang diberikan serta mencapai tujuan sesuai yang diharapkan oleh selaku pelaku UMKM.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha UMKM dan sebagai tolak ukur untuk penyelenggaraan Kampung Tematik selanjutnya agar dapat mencapai tujuan Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ravi Fauzan Ashar, Hartuti Purnaweni (2019)	Faktor Penetapan Implementasi Program Kampung Tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe Kota Semarang	Kualitatif Deskriptif	Terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan implementasi program tersebut yaitu komunikasi sesuai seperti yang diharapkan antara masyarakat dengan petugas setempat hingga meningkatnya kesejahteraan dan membentuk sinergisitas dengan baik.	Kampung Tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe telah merasakan keuntungan yang dibangun oleh program tersebut sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> masih melakukan pengembangan akan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasinya.
2.	Ersya, Nadya (2022)	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Kota Jambi Dalam Implementasi Program Kebijakan Bangkit Berdaya	Kualitatif	Partisipasi dari masyarakat turut aktif dalam memajukan dan membentuk semangat gotong royong dalam Program Bangkit Berjaya.	Bangkit Berdaya menjadi wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pendampingan dan pengerjaan infrastruktur

					sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> menjadi perhatian dari Bappeda Kota Semarang.
3.	Reina Hapsari Ayuningtyas, Amni Zarkasyi Rahman (2020)	Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang	Kualitatif Deskriptif	Komunikasi yang dijalankan dari Pemerintah Kota Semarang telah dijalankan dengan langsung melalui beberapa bentuk seperti sosialisasi, <i>Focus Group Discussion</i> dan <i>workshop</i> .	Implementasi yang dijalankan pada Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo memfokuskan pada aspek komunikasi kepada para <i>stakeholders</i> dan kelompok sasaran sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> memfokuskan pada 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
4.	Annisa Unafti, Rahmat Salam (2022)	Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Pada Kelurahan Parung Serab di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	Kualitatif	Dalam segi komunikasi telah berjalan secara baik dan efisien yang dilakukan oleh dinas, kelurahan serta masyarakat. Lalu segi sumber daya tengah minim memadai disebabkan pada sumber anggaran	Berfokus pada implementasi kebijakan bedah rumah pemerintah dengan berbagai upaya pemerintah sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> berfokus pada implementasi

				masih terbilang terbatas. Dalam segi disposisi telah dilakukan dengan optimal serta di segi struktur birokrasi antara <i>stakeholders</i> diterapkan dengan baik berdasarkan sistem operasional prosedur yang matang.	yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar tercapai tujuan yang telah diharapkan masyarakat.
5.	Uswatun Chasanah, Tharisma Novitasari, Aisyah Safira Nabila, Calvin Edo Wahyudi (2021)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	Kualitatif	Menyadari perbedaan antara penyebaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya sebelum pandemi serta selama Adaptasi Kebiasaan Baru.	Menganalisis fokus pada implementasi kebijakan PKH yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan perbedaan komunikasi melalui via <i>online</i> sedangkan implementasi Kampung Tematik <i>Home Industry</i> kebijakan tersebut pada pemberdayaan UMKM dan komunikasi yang dilakukan secara langsung.
6.	Suci Alfioni, Febri Yuliani (2022)	Implementasi Program Pada Satuan Pendidikan Non- Formal Kota Padang	Kualitatif	Program telah dijalankan dengan baik dilihat dari banyaknya perubahan yang berlangsung	Berfokus pada Program Pendidikan Non-Formal yang terdapat pada Peraturan

		Panjang		sesudah sanggar kegiatan belajar dibentuk menjadi Satuan Pendidikan.	Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2017 sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> mengacu dengan Peraturan Walikota Pasal 20 Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik.
7.	Widya Febriyani Tiffani, Mayasari, Maulana Rifai (2020)	Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi	Kualitatif	Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Implementasi Program KB tersebut belum seutuhnya dilaksanakan dengan baik dan efektif. Seperti halnya masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai alat kontrasepsi, minimnya pendidikan dan terbatasnya sumber daya.	Membahas mengenai segi struktur birokrasi, Fragmentasi kebijakan Implementasi Program KB di Kelurahan Sumur Batu telah sesuai dengan yang ditetapkan sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> masih perlu pembinaan dari Bappeda Kota Semarang.
8.	Fitria Y. Alim (2019)	Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial tersebut berjalan tidak efektif. Dapat	Fokus implementasi ini yaitu untuk mencari upaya atau solusi dari permasalahan dari Program Bantuan Sosial

		n Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso		dilihat melalui sosialisasi, masyarakat tidak paham akan tujuan program tersebut. Komunikasi yang tidak jalan dengan baik. Disposisi tidak adil serta tidak adanya koordinasi antar berbagai pihak.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> untuk mengetahui bagaimana keberjalanan UMKM apakah telah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum.
9.	Fatih Abdul Aziz (2021)	Implementasi Program Surabaya Eco School di SMPN 40 Kota Surabaya	Kualitatif	Dari hasil analisis memperlihatkan implementasi Program Surabaya <i>Eco School</i> tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif pada tahun ajaran 2019-2020 serta pelaksana keberhasilan program dirancang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Terdapat ketetapan antara aktor pelaksana dengan tugas pelaksana. Dalam hal ini dibentuk kru lingkungan hidup dan kru koordinasi. Ketetapan target program ini membantu kru agar dapat mewujudkan keperluan tiap kelompok kerja sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> memerlukan adanya pendampingan dengan dinas untuk masyarakat melalui pembinaan dan

					perhatian yang baik pada aspek pengawasan untuk pengembangan seluruh UMKM.
10.	Marisstela Aray, Johny Lumolos, Stefanus Sampe (2019)	Implementasi Program Bantuan Anak Asuh di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu	Kualitatif	Program sudah berjalan sesuai dengan Perwal mengenai program hak asuh dengan tim pelaksana program yang terdiri dari Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan, dan Unsur Perangkat Desa. Seluruh tim bekerja dengan tiap pembagian kerja dengan selalu memperhatikan aspek untuk tujuan keberjalanan.	Program Bantuan Anak Asuh menggunakan teori dari Edward III tetapi hanya menggunakan 3 aspek tanpa adanya struktur birokrasi sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> berfokus pada ke 4 aspek yang di kemukakan oleh Edward III.
11.	Nubaiti, Humaizi, Beti Nasution (2019)	Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru Implementasi Pendekatan Edward III Pada Kabupaten Aceh, Tamiang, Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Hasil yang ditemui menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi pada Dinas Pendidikan di Tamiang Aceh belum berjalan dengan efektif ditunjukkan pada beberapa kendala seperti minimnya sarana dan prasarana serta tidak konsistennya regulasi yang dibuat. Hal ini	Berdasarkan kendala yang ada, dapat dikatakan bahwa sertifikasi belum memainkan peran yang signifikan profesionalisme guru bersertifikat sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> belum mengoptimalkan dalam hal pengembangan

				membuat sulit bagi guru sehingga ketidakmampuan untuk memenuhi syarat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan ditemukannya beberapa guru bersikap kurang disiplin.	usaha para UMKM.
12.	M. R. Safira, R. Rachmawati (2022)	Implementasi Program Smart City di Magelang Melalui Aplikasi Magelang Cerdas	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa Aplikasi <i>Magelang Smart City</i> merupakan implementasi <i>Smart Governance</i> yang menyediakan layanan publik terintegrasi dan menggabungkan layanan publik dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang. Aplikasi ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik karena menguatkan pemerintah untuk terus memberikan pelayanan publik dan informasi kepada masyarakat melalui pengoptimalan pemakaian fitur di Aplikasi Magelang Cerdas.	Aplikasi Magelang Cerdas berfokus pada pengaruhnya terhadap pelayanan publik di Kota Magelang dengan menghadirkan ruang baru bagi masyarakat dan pemerintah Kota Magelang tanpa batas jarak dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada publik sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> berfokus pada pengoptimalan peningkatan pada seluruh UMKM yang terdapat di Kecamatan Candisari Kota Semarang.
13.	Sri Hartini	Studi	Kuantitatif	Kinerja aparatur	Berfokus pada

	Jatmikowati (2021)	Implementasi Kebijakan Publik Dalam Layanan E-Administrasi		administrasi dalam menyediakan kualitas pelayanan publik di Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo, bisa terlihat dari hasil analisis dan ulasan kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan kualitas pelayanan publik di Desa Tlogosari pemberian pelayanan kepada masyarakat belum terlaksana sesuai keinginan dan sasaran yang direncanakan.	administrasi yang merupakan hal signifikan terjadi pada pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tlogosari sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> berfokus pelayanan masyarakat yang menjadi UMKM Kota Semarang.
14.	R.L.Fitriana, D.G. Suharto, R.D Wahyunengsih (2021)	Implementasi Kebijakan Transportasi Bus Suroboyo Membayar Dengan Limbah Botol Plastik	Kualitatif	Pelaksanaan Bus Suroboyo dinilai cukup baik, dengan adanya dukungan dari masyarakat yang mempunyai dampak nyata. Tetapi di sisi lain, masih terdapat kendala dalam implementasi Suroboyo Bus yang belum terintegrasi dengan baik dalam prosedur kontribusi sampah.	Terdapat kendala yaitu kurangnya armada bus yang disiapkan oleh pelaksana dan kurangnya tempat penampungan sampah sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> pada sistem penjualan, barang-barang produksi mendatangi keterlambatan yang disebabkan

					persaingan yang ada di pasaran.
15.	Agustuti, Cindy Damayanti (2021)	Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung	Kualitatif Deskriptif	Faktor yang mendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan yang ada, karyawan perlu dipersiapkan dengan kemampuan dan profesionalisme untuk memberikan layanan berkualitas tinggi berdasarkan konsepsi manajemen SDM atau memanfaatkan keluhan dari masyarakat mengenai layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada faktor yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB tepat waktu.	Adanya kerja sama yang dibangun antara pihak kepolisian dan jasa raharja dalam pembayaran pajak sedangkan Kampung Tematik <i>Home Industry</i> melakukan kerja sama atau dipantau oleh Bappeda Kota Semarang

Sumber Data: Diolah dari berbagai jurnal, 2023

Tabel 1.4 merupakan jurnal penelitian yang dijadikan sebagai referensi dan dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang sudah dibahas sebelumnya terkait implementasi dengan menggunakan teori Edward III. Dengan menggunakan

teori dari Edward III, mempunyai keunggulan yaitu lebih mudah dan jelas untuk dipakai pembahasan teori ini karena terdapat kesanggupan dalam meringankan fenomena-fenomena yang kompleks untuk membentuk suatu model implementasi kebijakan agar tidak sulit.

Berdasarkan penelitian atau jurnal terdahulu yang menjadi referensi peneliti, dapat disimpulkan bahwa lima belas jurnal di atas memiliki penggunaan teori yang sama, yaitu Teori Edward III yang membahas tentang implementasi kebijakan pada suatu program. Faktor-faktor yang menjadi pembahasan dari teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal lain, penulis memakai metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu beberapa jurnal tersebut tidak meneliti mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat mengenai program yang telah dibuat.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi merujuk bahwa suatu proses bergerak karena beberapa faktor, seperti kegiatan, kerja sama antar individu, serta terdapat kontrol atau kepemimpinan sebagai pengarah sehingga terlaksananya suatu tujuan kehidupan dalam bermasyarakat atau kepentingan publik. Kata publik berakar dari bahasa Inggris "*public*" dengan arti umum, rakyat umum, orang banyak serta rakyat. Kata "publik" diartikan oleh beberapa kalangan berbeda sesuai dengan kepentingan mereka. Menurut Nicholas Henry (2008: 8) dalam buku Deddy Mulyadi mendefinisikan administrasi publik merupakan

gabungan yang saling berhubungan terkait teori dan praktik sesuai arahan mempublikasikan interpretasi oleh pemerintah yang mana berhubungan kepada masyarakat yang diperintah dan pula menjadi pendorong kebijakan publik sehingga makin kooperatif dengan kebutuhan sosial. Administrasi publik berupaya melembagakan aksi-aksi manajemen agar setara pada nilai efektivitas dan efisiensi. Menurut Chandler dan Plano (2008:3) pada buku Deddy Mulyadi, administrasi publik ialah prosedur dimana sumber daya serta personil publik dikendalikan dan disistemkan guna memformulasikan, menerapkan dan mengelola (*manage*) terhadap seluruh ketetapan kebijakan publik.

Menurut Gordon (1982: 82) (dalam Kadir, 2020: 62), Administrasi Publik memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Hal ini sudah mempengaruhi pengembangan ilmu administrasi publik yang sekarang meliputi analisis serta perumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), implementasi serta pengendalian implementasi (*policy implementation*), dan evaluasi implementasi kebijakan (*policy evaluation*). Sebagai ilmu sosial, administrasi publik menguji sistem pengelolaan negara yang mencampurkan antara kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik pun berkaitan pada lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif dengan banyaknya regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam tata bahasa, administrasi publik terdapat

makna yang berasal dari 2 kata, yaitu administrasi dan publik. Maka administrasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas ataupun kerja sama sekelompok orang dalam rangka menggapai tujuan yang telah ditentukan. Publik di artikan sebagai negara dan masyarakat, yang mana administrasi publik dapat dimaksudkan suatu tahapan dalam melaksanakan ketetapan atau kebijakan terhadap kepentingan negara dan khalayak umum.

Berdasarkan uraian yang telah dikatakan oleh para ahli di atas, bisa disimpulkan definisi arti Administrasi Publik yaitu sebagai individu bertindak sesuai peran masing-masing dalam penetapan peraturan dengan memiliki tugas pada proses implementasi kebijakan publik dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitannya definisi tersebut pada penelitian ini yaitu pada tindakan pelaksana pemerintah ataupun UMKM yang memiliki peran dalam Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ilmu pengetahuan yang dinamis serta sudah menjumpai transformasi dan pembangunan dari waktu ke waktu sebanding dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul adalah sudut pandang ahli mengenai peranan hingga tantangan Administrasi Publik untuk menanggapi hambatan yang muncul. Berikut terdapat 6 paradigma administrasi publik:

Paradigma I: Dikotomi Politik/Administrasi 1900 – 1926, Pada abad ke-19 para ahli administrasi seperti Frank Goodnow (*Politics and*

Administration:1900). Periode paradigma I ini ialah administrasi dipisahkan dari politik (dikotomi administrasi dan politik). Kemudian, Dwight Waldo (1955) memformulasikan poin yang disampaikan oleh L.D. White (1926) dalam buku *Introduction to Study of Public Administration* yaitu bahwa politik sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang administrasi: manajemen sendiri adalah suatu studi ilmiah: administrasi negara dapat menjadi ilmu yang bebas memajukan nilai yang dianutnya (*value free*) dan misi (tujuan) administrasi adalah ekonomi dan efisiensi waktu. Hanya saja pada waktu ini para ahli administrasi hanya dapat memperlihatkan lokus ilmu ini yaitu di dalam birokrasi pemerintah. Sebaliknya, fokus ilmu tersebut belum dapat diperlihatkan. Dalam masa ini, administrasi bertumbuh pada administrasi negara dan administrasi niaga.

Paradigma II: Prinsip-prinsip Administrasi 1927-1937, T.W. Willoughby pada bukunya *Principle of Public Administration* mengusung hal baru pada pengembangan ilmu administrasi. Beliau menyampaikan terdapat prinsip administrasi bersifat ilmiah yang bisa dijalankan oleh administrator. Terpenting untuk administrator yang sudah menganalisis prinsip tersebut adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip tersebut pada penerapannya. Oleh karena itu, prinsip administrasi dijadikan inti ilmu administrasi dan lokusnya tetap pada birokrasi pemerintah.

Paradigma III: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik 1950-1970, Kupasan ideal pada ilmu administrasi negara mendatangkan ilmu administrasi kembali ke induknya yaitu ilmu politik. Tetapi, para ahli

administrasi senantiasa berupaya untuk menciptakan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tahun 1962 ilmu administrasi negara tidak lagi dilibatkan dalam sub bidang dari ilmu politik, dapat dilihat pada laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Untuk itu, para ahli administrasi berpandangan telah saatnya masa ilmu administrasi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Persepsi tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian pada artikel yang ditulis antara 1960-1970 pada jurnal Ilmu Politik yang hanya menempatkan bidang politik 4%, sedangkan yang lainnya merupakan mengenai bidang administrasi negara. Dengan hal tersebut, para ahli administrasi melihat bahwa administrasi negara adalah ilmu administrasi dari kelompok ilmu sosial.

Paradigma IV: Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi 1956-1970, Pada masa ini para ahli administrasi negara dapat melengkapi ilmu ini dengan menyajikan letak fokus ilmu administrasi negara. Ilmu ialah sekumpulan pengetahuan-pengetahuan yang mana datanya telah tersusun dan telah diuji keabsahannya. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh suatu ilmu ialah memiliki fokus (objek) tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Sedangkan sifat ilmu pengetahuan menurut pengertian yang moderat merupakan berlangsung dari proposisi (pernyataan) dengan diuji serta menyatakan kepada realitas yang ada, terbuka untuk dikritik secara rasional (masuk akal), apakah membenarkan, memperbaiki, atau mengatakan palsu.

Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970), Merupakan poin penting dari teori organisasi pada masa ini dengan bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Dapat disimpulkan bahwa administrasi negara pada masa ini lebih berfokus dengan teori organisasi dan ilmu manajemen. Sedangkan lokusnya ialah keperluan publik dan kesejahteraan publik.

Paradigma VI: *Governance* (1990-sekarang), Seiring terjadinya perubahan yang ada mendatangkan perubahan mengenai karakter dan tugas pemerintah. Perubahan sifat dan peranan tersebut menciptakan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan dari konsep "*government*" kepada konsep "*governance*". Keterkaitan pada perubahan ialah bahwa pemerintah tidak lagi aktor yang utama pada pengendalian negara seperti dalam pengendalian negara terdahulu. Pengembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep *government* ke konsep *governance* tersebut, membuat paradigma hubungan antar pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih sepadan dan kerakyatan. Arah perkembangan yang terjadi pada paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Paradigma merupakan suatu paham maupun cara pandang yang diperlukan guna menimbang dunia dan sekitarnya, yang mana menggambarkan perspektif umum dengan metode dalam menganalisis berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Paradigma yang terjadi ialah sudut pandang mengenai peranan dan tantangan dalam

menjawab masalah yang muncul. Penelitian ini termasuk dalam lingkup bahasan pada paradigma V mengingat implementasi program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang merupakan implementasi yang dilaksanakan untuk menyajahterakan publik atau masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan dengan pemenuhan sarana prasarana yang lebih baik agar dapat mewujudkan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat setempat dengan dibentuknya UMKM melalui potensi yang diangkat.

1.6.4 Implementasi Program

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merujuk terhadap perbuatan dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu keputusan. Perbuatan tersebut bertujuan untuk merubah suatu keputusan menjadi pola operasional dan berupaya mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi juga pada dasarnya, usaha untuk memahami apa yang seharusnya berjalannya sesudah program dilaksanakan. Grindle (dalam Mulyadi, 2015:47) mengatakan bahwa implementasi adalah proses tindakan administratif umum yang dapat dievaluasi pada tingkat program tertentu. Sementara itu, Horn (dalam Taahir, 2014:55) menyebutkan bahwa implementasi ialah kegiatan yang dilaksanakan dengan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) proses implementasi bukan dimulai saat tujuan dan target ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tetapi proses implementasi berjalan sesudah adanya selesainya tahapan legislatif serta pendistribusian sumber daya serta dana sudah disepakati. Pressman dan Wildavsky (dalam Syahida, 2014:8-9) menyatakan kalau implementasi adalah "*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Dengan kata lain, secara etimologis, implementasi bisa diartikan sebagai kegiatan berterkaitan pada penanganan suatu pekerjaan menggunakan sarana agar mencapai sesuatu yang dihasilkan. Secara umum, implementasi adalah tahapan yang dijalankan tanpa adanya batas dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan lainnya. Implementasi dilakukan secara sistematis dalam menggapai tujuan tertentu.

Menurut Teori Implementasi (George Edward III dalam Widodo 2010:96), implementasi adalah proses yang mendasar pada betapa layakannya suatu kebijakan ketika tidak dirancang atau dikemas kurang baik implementasinya maka yang jadi tujuan kebijakan publik tidak terwujud seperti yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagaimana baiknya perancangan awalan implementasi kebijakan, ketika tidak dirancang dengan baik maka yang jadi tujuan kebijakan pun tidak dapat tercapai. Dengan begitu, untuk dapat memperoleh tujuan kebijakan, perumusan kebijakan, serta pencapaian implementasi harus mempersiapkan dan merencanakan seluruhnya dengan maksimal. Pernyataan tersebut berkaitan dengan penelitian ini yaitu

implementasi program kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang. Program tersebut merupakan program inovatif yang diresmikan oleh pemerintah Kota Semarang dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut. Dalam menjalankan program tersebut, pihak-pihak yang terkait berpedoman dengan Peraturan Walikota (Perwal) Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Perwal ini dilihat dari mulai tata cara perencanaan hingga monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama keberjalanan program.

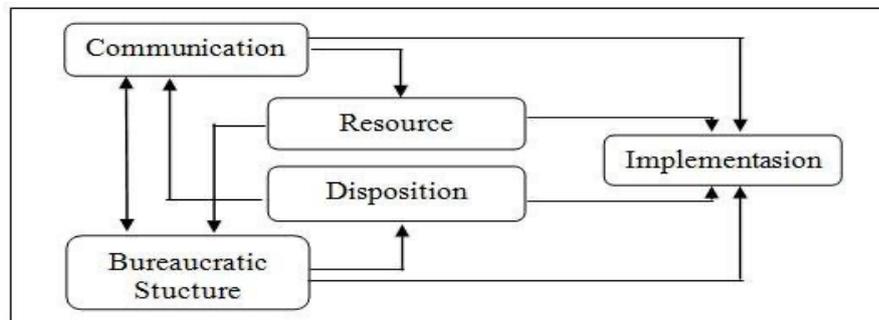
1.6.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

Implementasi dari pernyataan Edward III terdapat 4 (empat) faktor dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang harus bereaksi berteepatan serta saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Adanya kaitan antara faktor-faktor tersebut dapat dilihat melalui gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2

Empat Faktor Berpengaruh Terhadap Implementasi George Edward III



Sumber Data : Edward III dalam Widodo 2010:107

Adapun gambaran mengenai faktor-faktor di atas diterangkan sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi menjadi faktor penting yang dikaitkan pada penyampaian informasi, gagasan, kecakapan, dan lainnya dengan memakai suatu sarana terhadap pihak yang menerimanya (Anwar Arifin, 2005:5). Komunikasi mesti dilakukan secara tepat dan perlu dipahami dengan seksama oleh pelaku yang menjalankan komunikasi tersebut agar tersampaikan dengan baik melalui adanya konsistensi atau keseragaman tujuan. Komunikasi dinilai sebagai tolak ukur seberapa jauh kebijakan pada regulasi sudah tersampaikan dengan jelas dan akurat yang mana terdapat interpretasi yang sama serta mampu dijalankan dengan konsisten oleh pelaksana peraturan. Informasi tentang kebijakan berdasarkan Edward III dalam Widodo (2010:97) patut disalurkan pada pelaksana kebijakan supaya para pelaksana mampu memahami apa saja yang perlu dipersiapkan selama

melakukan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran mampu terwujud seperti yang diharapkan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber Daya mempunyai peranan penting pada implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mempunyai sumber-sumber diperlukan pada pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara konsisten. Berdasarkan Edward III menyebutkan sumber daya yang meliputi sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (*Staff*) : Faktor ini berpengaruh pada keberhasilan pada pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyebutkan bahwa “Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli secara akurat dapat ditransmisikan, jika pelaku yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan suatu pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif”.
- b. Sumber Daya Dana (*Budgetary*) : Edward III dalam Widodo (2010:100) menyimpulkan bahwa “Pembatasan anggaran dan oposisi masyarakat memagari penerimaan fasilitas yang memadai. Dimaksudkan dalam gilirannya pembatasan kualitas layanan yang dapat dikasihkan oleh implementor kepada publik”. Ketika adanya dependensi sumber daya anggaran menyebabkan pengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Jadi program yang dijalankan

tidak bisa diwujudkan secara optimal, terpatoknya dana mengakibatkan disposisi pelaksana kebijakan minim.

- c. Sumber Daya Peralatan (*Equipment*) : Edward III dalam Widodo (2010:102) menyebutkan sumber daya peralatan adalah alat yang menjadi faktor berpengaruh pada implementasi kebijakan. Alat yang digunakan pada pelaksanaan implementasi di dalam kebijakan tersebut melingkupi tanah, bangunan, dan alat yang seluruhnya akan memudahkan pemberian pelayanan implementasi kebijakan yang diberikan kepada publik.
- d. Sumber Daya Kewenangan (*Authority*) : Edward III dalam Widodo (2010:103) menyebutkan pelaksana kebijakan mesti memberi wewenang yang memadai pada pembuatan keputusannya sendiri agar menjalankan kebijakan menjadi kewenangannya. Wewenang berfungsi untuk memastikan dan menanggung pada kebijakan yang dilakukan sebanding apa yang dikehendaki. Menurut Edward III menyatakan “*Authority* yang memadai dalam pembuatan keputusan pada suatu lembaga berpengaruh di lembaga itu sendiri untuk menjalankan suatu kebijakan. Kewenangan tersebut menjadi penting ketika menemui permasalahan dan mewajibkan agar kunjung dikerjakan terhadap suatu keputusan”.

3. Disposisi (*Disposition*)

Menurut Edward III menyatakan bahwa disposisi sebagai dorongan dan kecondongan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan

dengan betul-betul maka yang menjadi maksud kebijakan mampu terwujud. Variabel menurut Edward III dalam Agustinus (2006:129-160) tentang disposisi pada implementasi kebijakan yaitu (1) Pengangkatan Pelaksana, yaitu sikap akan menumbuhkan halangan nyata pada implementasi kebijakan ketika terdapat salah satu pelaksana tidak menjalankan kebijakan yang dibutuhkan oleh pemegang kebijakan. Sehingga penetapan pelaksana kebijakan mesti individu yang mempunyai loyalitas kebijakan yang sudah ditentukan, terlebih kepada kepentingan publik. (2) Insentif, yaitu salah satu cara dalam melewati permasalahan dari kelakuan pelaku kebijakan dengan menyelewengkan insentif. Dasarnya individu berjalan berlandaskan keperluan dirinya sendiri, maka menyelewengkan insentif oleh pembentuk kebijakan berpengaruh dengan perbuatan pelaku kebijakan. Dengan cara menambahkan kegunaan atau biaya tertentu tampaknya akan menjadi faktor pendorong yang menjadikan para pelaksana melakukan perintah dengan baik. Peristiwa dilangsungkan selaku upaya memenuhi keperluan individu maupun organisasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III menyebutkan implementasi kebijakan dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dikarenakan terdapat ketidakefektifan dalam struktur birokrasi. Meliputi faktor-faktor struktur birokrasi, pengelompokan wewenang, hubungan antara bagian organisasi dan lainnya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) ada 2 sikap utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi". SOP

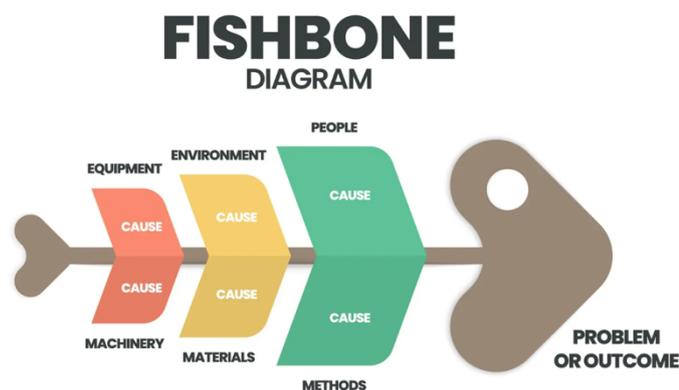
ialah pengembangan permintaan internal kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyesuaian pada organisasi kerja yang erat dan luas. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyebutkan jelas atau tidaknya standar operasi yang menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab antara pelaksana, serta tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lain juga berdampak pada penentuan keberhasilan implementasi kebijakan.

Parameter SOP dijalankan dalam mengatasi keadaan-keadaan umum dari berbagai sektor. SOP digunakan oleh para pelaksana agar bisa memaksimalkan waktu yang ada serta bermanfaat dalam keselarasan respon-respon pemangku kepentingan pada organisasi secara kompleks dan tersebar menyeluruh sehingga tercipta fleksibilitas hingga kesesuaian yang besar dalam penetapan peraturan. Terdapat kemungkinan SOP menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan baru yang memerlukan metode baru maupun tipe personil baru dalam menjalankan kebijakan. Semakin besar kebijakan, memerlukan perubahan dengan cara normal pada suatu organisasi, semakin besar juga probabilitas SOP menghambat implementasi. Disisi lain, SOP mempunyai faedah yang mana organisasi dengan proses perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang baik terdapat kemungkinan lebih dapat menempatkan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai tanda-tanda yang ada.

Sikap selanjutnya dari birokrasi yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah perluasan kewajiban pada kebijakan pada beberapa badan sehingga diperlukannya suatu koordinasi. Secara umum, semakin sering koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan, semakin berkurang peluang keberhasilan program. Fragmentasi menimbulkan pengamatan yang sempit dari berbagai pihak yang mana dapat menyebabkan dampak merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil pengelompokan faktor-faktor tersebut kemudian disimpulkan melalui metode Fishbone atau yang sering disebut *Cause Effect Diagram* yang mana suatu cara yang digunakan dalam menunjang untuk memecahkan masalah dengan dilakukannya analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan pada suatu diagram yang tampak seperti tulang ikan.

Gambar 1.3
Fishbone Diagram



Sumber Data: Website Marketeers, 2024

Diagram di atas dapat menjabarkan permasalahan yang terjadi dan

mengidentifikasi akar penyebab masalah yang mana selanjutnya membantu untuk menemukan solusi atau saran yang tepat. Adapun tahapan-tahapan yang harus diperhatikan:

- a. Mengidentifikasi Masalah: dengan mencari tahu siapa saja yang ikut serta, permasalahannya, dan dimana hal itu terjadi. Masalah utama divisualkan dalam bentuk kotak sebagai kepala dari diagram fishbone.
- b. Mengumpulkan Ide Mencari Faktor Utama Penyebab: mengelompokkan penyebab dari masalah yang dihadapi. Termasuk faktor-faktor yang menjadi bagian dari masalah, seperti peralatan, material, sdm, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut adalah penyusun tulang utama dari diagram fishbone.
- c. Mengidentifikasi Kemungkinan Penyebab Masalah: berbagai kemungkinan penyebab yang ditemukan dari setiap faktor, akan digambarkan sebagai “tulang kecil” dari “tulang utama”. Setelah itu akan dicari tahu akar penyebab dari setiap kemungkinan tersebut yang dilakukan dengan observasi lapangan.
- d. Menyepakati Akar Permasalahan: disepakatinya *root cause* atau akar permasalahan dari diagram fishbone.
- e. Mendiskusikan Solusi: setelah mengetahui akar permasalahan kemudian adanya solusi yang memungkinkan untuk memperbaiki masalah hingga mencegah terjadinya kesalahan yang terjadi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini fenomena yang akan diteliti yaitu Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry*.

1.7.1 Implementasi Program

Implementasi Program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan program agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* Kota Semarang berpacu pada regulasi Peraturan Walikota (Perwal) Kota Semarang Bab IV hingga VII Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* sebagai berikut:

1. Tata Cara Perencanaan Program Kampung Tematik *Home Industry*, pada proses awal implementasi diperlukan adanya perencanaan melalui pemetaan potensi, permasalahan, dan penentuan tema. Hal ini terkait dengan usaha dan pelatihan apa yang diperlukan oleh pelaku UMKM di kampung tematik *home industry* dalam hal pemberdayaan serta pengembangan potensi.
2. Sosialisasi Program Kampung Tematik *Home Industry*, proses kedua yaitu sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Pelaksanaan Program Kampung Tematik *Home Industry*, proses ketiga yaitu keberjalanan dari Program Kampung Tematik *Home*

Industry yang mana setelah pelaku UMKM diberikan sosialisasi tersebut, selanjutnya usaha industri rumahan mulai berjalan dalam naungan Program Kampung Tematik dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup.

4. Monitoring dan Evaluasi Program Kampung Tematik *Home Industry*, proses terakhir yaitu mengawasi dan mengevaluasi keberjalanan program dengan dilakukan secara berkala. Proses ini bertujuan untuk dapat memantau dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

1.7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi

Teori implementasi oleh Edward III merupakan kerangka kerja dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program. Teori faktor-faktor implementasi Edward III membantu untuk memahami kompleksitas implementasi program dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan keberjalanannya. Teori ini mencakup empat indikator yang diperlukan sebagai dasar mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi program, sebagai berikut:

1. Komunikasi, fenomena penting yang berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan dan lainnya yang mana komunikasi harus tercipta secara tepat dan dimengerti oleh pelaksana dengan melihat dari kejelasan, akurat serta konsistensi tujuan.
2. Sumber Daya, diperlukannya sumber-sumber untuk melaksanakan implementasi program dengan melihat dari sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya peralatan, dan sumber daya

kewenangan.

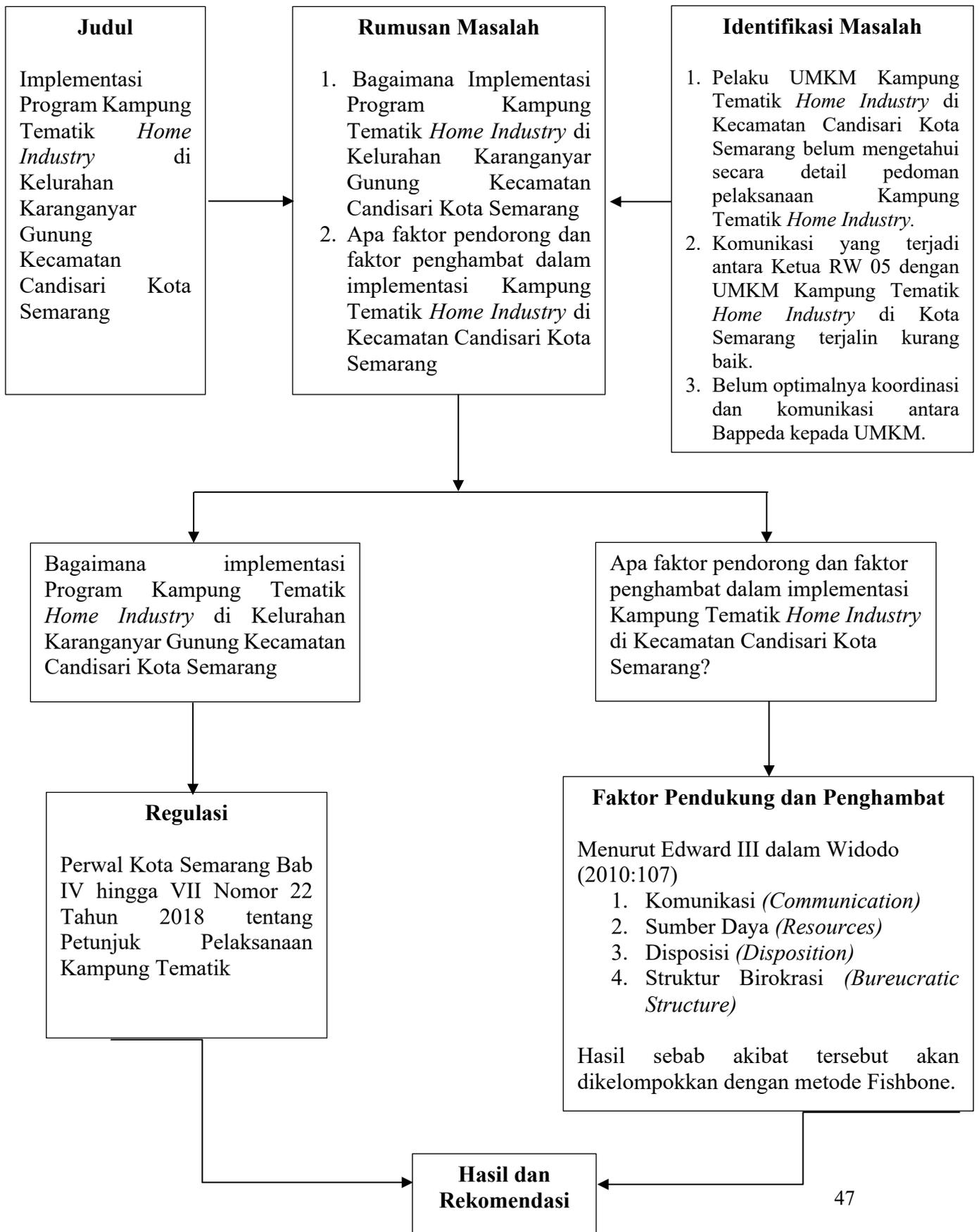
3. Disposisi, sikap dari pelaksana memiliki konsekuensi yang penting untuk mendukung implementasi program dengan melihat dari pengangkatan pelaksana dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dari para pelaksana untuk mengetahui apa dan bagaimana cara melaksanakannya dengan melihat dari *standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Tabel 1.5
Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Implementasi	Tata Cara Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan potensi dan permasalahan - Penentuan tema - Penyusunan dan verifikasi proposal kampung tematik
	Sosialisasi Program Kampung Tematik <i>Home Industry</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses sosialisasi - Pemberian sosialisasi
	Pelaksanaan Program Kampung Tematik <i>Home Industry</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian anggaran - Sarana dan prasarana - Koordinasi antar pihak - Regulasi izin usaha - Metode penjualan - Tata cara kerja dan kepengurusan
	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan dan akurat mengenai penyampaian informasi - Komunikasi antar pihak - Koordinasi dan responsivitas
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia - Sumber daya dana - Sumber daya peralatan - Sumber daya kewenangan
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan pelaksana - Insentif
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> - Fragmentasi

Sumber Data: Data Sekunder (diolah), 2024

1.8 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti akan dapat memahami fenomena yang dialami kepada subjek penelitian melalui deskripsi yang diutarakan dalam kata-kata serta bahasa sesuai pada konteks yang dialami.

Penulisan laporan ini, peneliti melangsungkan penelitian bersifat lapangan (*field research*). Penulis menganalisis implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang serta menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam analisis implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian dimana menjadi objek yang diteliti. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang karena terdapat Kampung Tematik yang bertemakan *Home Industry* dengan terdapat banyak UMKM dari berbagai macam produk yang di jual.

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung, Semarang, dan

mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya untuk meningkatkan program tersebut di masa depan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini patut mengetahui dan mempunyai pengalaman yang banyak tentang penelitian, serta dapat membagikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat yaitu Kampung Tematik *Home Industry*. Dalam konteks penelitian subyek penelitian ini terdiri dari:

1. Pelaku UMKM yang terdapat di Kampung Tematik *Home Industry*
2. Ketua RW 05 dan Pengurus Kampung Tematik *Home Industry*
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang

1.9.4 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata serta gambar dan bukan angka (Moleong, 2011;11). Jenis data yang dikumpulkan, diperoleh melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang diperoleh pada saat peneliti melakukan observasi data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dengan informan terkait.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data merupakan catatan atas kumpulan fakta. Data yang terkumpul, kemudian diolah sehingga dapat diurutkan secara jelas dan tepat

sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. Data yang didapatkan melalui 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan informan. Pada penelitian ini, informan yang digunakan sebagai data primer adalah informan dari Pelaku UMKM Kampung Tematik *Home Industry*; Ketua RW dan Pengurus Kampung Tematik *Home Industry*; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data ini berasal dari sumber dan literatur berupa jurnal tentang implementasi program, dokumen regulasi Peraturan Walikota, hasil penelitian terdahulu, serta berita-berita di internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumen.

1. Observasi

Metode yang dilakukan melalui cara pengamatan serta mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu mengetahui bagaimana implementasi di Kampung Tematik *Home Industry* Kota Semarang

dilakukan dengan berbagai usaha yang dibangun oleh Pelaku UMKM mulai dari bentuk barang hingga makanan, permasalahan yang dialami, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat keberjalanan Kampung Tematik *Home Industry* Kota Semarang.

2. Wawancara

Pada konteks penelitian ini, informan yang dilibatkan yaitu berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Informan yang terlibat yaitu Pelaku UMKM sebagai masyarakat yang berpartisipasi dan menjalankan program Kampung Tematik, Ketua RW dan Pengurus Kampung Tematik *Home Industry* yang bertugas mengkoordinasi antara pelaku UMKM dengan Pemerintah dan mendata seluruh keberjalanan kegiatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang memiliki wewenang tertinggi dalam keberjalanan Kampung Tematik *Home Industry* mulai dari pihak yang memberikan perizinan hingga mengucurkan dana untuk Kampung Tematik *Home Industry*. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka, sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola media yang melengkapi informasi lisan yang disampaikan oleh informan. Komunikasi yang dilakukan berbentuk wawancara dengan pertanyaan (*interview guide*) yang digunakan sebagai pedoman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan kegiatan pada saat observasi dan wawancara. Pengumpulan data diperoleh melalui hasil laporan dan keterangan foto melalui wawancara dengan Pelaku UMKM, Ketua RW dan Pengurus Kampung Tematik *Home Industry*, dan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang dihasilkan oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memilih teknik dokumentasi untuk digunakan sebagai acuan dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan dalam penelitian ini menggunakan :

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan memfokuskan pada data penting serta merangkum data utama. Dalam reduksi data dapat dicari dan difokuskan dengan menggunakan kata kunci yaitu Kampung Tematik, Implementasi, UMKM, serta Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi. Dengan cara ini, ketika data direduksi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga peneliti dengan lebih mudah melakukan pengumpulan data lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Dengan mengutip hasil wawancara dan mengutip dokumen yang relevan seperti jurnal terkait penelitian dan Perwal Kampung Tematik. Penulisan hasil analisis data dituangkan pada kualitatif yang menggunakan pendekatan naratif dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa, penjelasan contoh, maupun hubungan antar pelaku penelitian.

3. Kesimpulan

Terdapat penarikan kesimpulan pada bagian akhir hasil tulisan ilmiah yang menyajikan ringkasan dari seluruh penelitian, dimana penelitian kualitatif akan menjadi suatu karya baru yang dapat berkembang pada penelitian selanjutnya sehingga terbentuk sebuah premis atau hipotesis. Sehingga peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan untuk menjelaskan dan menggambarkan dari hasil penelitian implementasi program Kampung Tematik *Home Industry* Kota Semarang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program tersebut.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan atau validitas data. Teknik triangulasi yang digunakan terbagi menjadi tiga, yang pertama yaitu triangulasi sumber. Pada penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber diperlukan untuk mengukur kredibilitas data yang sama dengan berbagai kalangan informan dengan cara melakukan wawancara dengan Pelaku UMKM, Ketua RW dan Pengurus

Kampung Tematik *Home Industry*, dan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.

Selanjutnya triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang diambil dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik berbeda. Triangulasi teknik biasanya dipergunakan sebagai wadah identifikasi kebenaran pernyataan informan dalam wawancara dengan data didapat dalam penelitian ini melalui metode yang berbeda, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan (secara langsung), dan dokumen. Ketiga yaitu triangulasi waktu yang dilakukan sebagai uji kredibilitas data terhadap waktu serta situasi yang berbeda agar dapat ketetapan data. Penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu 1 bulan mulai dari bulan Maret hingga April 2024.